



BADAN PUSAT STATISTIK

Pelopor
Data Statistik
Terpercaya
Untuk Semua

PENGUATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK

DIREKTORAT DISEMINASI STATISTIK BPS





Outline

Dasar Hukum

Kegiatan Statistik

Tahapan
Penyelenggaraan
Kegiatan Statistik

Mekanisme Kerja
Statistik di Daerah

Mekanisme
Rekomendasi Kegiatan
Statistik Sektoral

Pengenalan Indikator
dan Metadata
Indikator



Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan Statistik

- ☐ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
- ☐ Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- ☐ Keputusan Kepala BPS Nomor 5 tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional
- ☐ Keputusan Kepala BPS Nomor 6 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar
- ☐ Keputusan Kepala BPS Nomor 7 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral
- ☐ Keputusan Kepala BPS Nomor 8 tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus
- ☐ Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah



Keterkaitan 2 Undang-Undang

UU 16 / 1997 Tentang Statistik



BPS adalah penyelenggara
Statistik Dasar
(Pasal 11 ayat 1)

Instansi pemerintah adalah
penyelenggara Statistik Sektoral
(Pasal 12 ayat 1)



UU 23/ 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



Statistik merupakan
urusan pemerintahan
konkuren wajib non
pelayanan dasar
(Pasal 12 ayat 2n)



Keterkaitan 2 Peraturan Pemerintah

**PP 51 / 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik
(Turunan UU 16 / 1997)**

BPS adalah penyelenggara
Statistik Dasar
(Pasal 2 ayat 2)

Instansi pemerintah adalah
penyelenggara Statistik Sektoral
sesuai Tupoksinya
(Pasal 23 ayat 1)

Instansi penyelenggara **Survei Statistik
Sektoral wajib memberitahukan
kegiatannya dan mengikuti
rekomendasi**
(Pasal 22 ayat 2ab)

&

**PP 18 / 2016 tentang
Perangkat Daerah
(Turunan UU 23 / 2014)**

Dibentuk Organisasi Statistik
Sektoral di Prov/Kab/Kota

BPS merupakan lembaga yang
berwenang atas urusan statistik
(Persandian oleh Lemsaneg;
Informatika oleh
Kemenkominfo)

Statistik satu rumpun
dengan Persandian maupun
dengan Informatika
(Pasal 18 ayat 4e dan Pasal
37 ayat 4n)



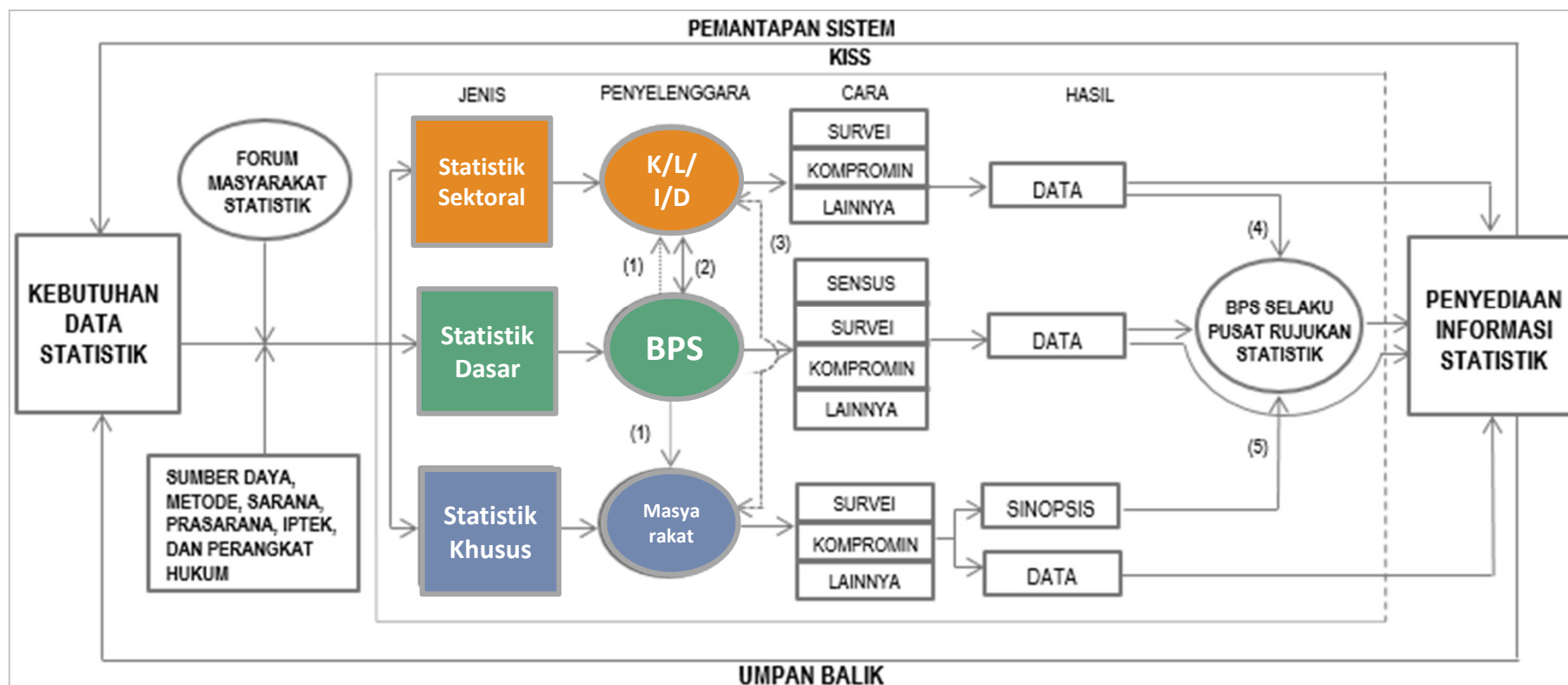
Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah menyelenggarakan statistik sektorial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama daerah.
(penjelasan pasal 2)

Dalam penyelenggaraan statistik sektorial, Pemerintah Daerah mengacu pada penggunaan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang digunakan oleh BPS guna memperoleh keterbandingan hasil
(pasal 11)



Sistem Statistik Nasional



KETERANGAN :

KISS : Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standardisasi

KOMPROMIN : Kompilasi Produk Administrasi

(1) : BPS mengkoordinasi penyelenggaraan statistik

(2) : Instansi Pemerintah memberitahukan rancangan survei

dan BPS memberikan Rekomendasi

(3) : Instansi Pemerintah dan Masyarakat saling berkoordinasi dan kerjasama

(4) : Instansi Pemerintah menyerahkan hasil ke Pusat Rujukan Statistik

(5) : Masyarakat menyerahkan sinopsis ke Pusat Rujukan Statistik



Tiga Jenis Statistik

berdasarkan UU No 16 Tahun 1997 Pasal 5

Jenis	Penjelasan	Penyelenggara
Statistik Dasar (Ps 1 angka 5)	• Untuk keperluan yang bersifat luas • Dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat • Ciri-ciri: lintas sektoral, berskala nasional, makro	BPS
Statistik Sektoral (Ps 1 angka 6)	• Dimanfaatkan oleh instansi tertentu untuk memenuhi tugas pokok instansi tersebut	Intansi pemerintah, mandiri atau bersama dengan BPS
Statistik Khusus (Ps 1 angka 7)	• Dimanfaatkan untuk kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain	Lembaga, organisasi, perorangan, unsur masyarakat lainnya.



Kegiatan Statistik

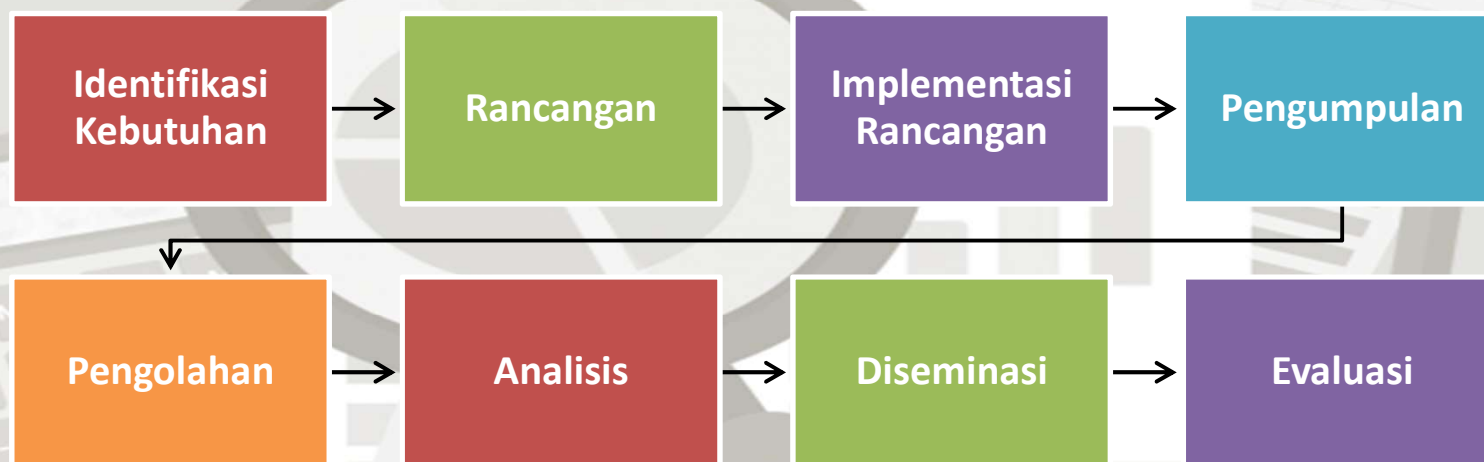
berdasarkan UU No 16 Tahun 1997 Pasal 1

Kegiatan statistik adalah kegiatan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebaran data, pengembangan ilmu statistik, serta upaya pengembangan Sistem Statistik Nasional

Cara Pengumpulan Data	Penjelasan
Sensus	Pencacahan semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik populasi tersebut pada saat tertentu
Survei	Pencacahan sampel/sebagian unit populasi untuk memperkirakan karakteristik populasi tersebut pada saat tertentu
Kompilasi Produk Administrasi	Pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan/atau masyarakat



Tahapan Penyelenggaraan Kegiatan Statistik





Metadata

**Identifikasi
Kebutuhan**

Rancangan

Implementasi
Rancangan

Pengum-
pulan

Pengo-
lahan

Analisis

Diseminasi

Evaluasi

Identifikasi Kebutuhan

Mengidentifikasi kebutuhan

Konsultasi dan konfirmasi
kebutuhan

Menentukan tujuan

Identifikasi konsep dan definisi

Memeriksa ketersediaan data

Membuat proposal kegiatan
(Term Of Reference)



Metadata

Identifikasi
Kebutuhan

Rancangan

Implementasi
Rancangan

Pengum-
pulan

Pengo-
lahan

Analisis

Diseminasi

Evaluasi

Rancangan

Merancang output

Merancang deskripsi
variabel

Merancang pengumpulan
data

Merancang kerangka
sampel dan pengambilan
sampel

Mendesain *sampling*

Merancang pengolahan
dan analisis

Merancang sistem dan alur
kerja



Metadata

Identifikasi
Kebutuhan

Rancangan

**Implementasi
Rancangan**

Pengum-
pulan

Pengo-
lahan

Analisis

Diseminasi

Evaluasi

Implementasi Rancangan

Membuat instrumen
pengumpulan data
(kuesioner)

Membangun komponen
diseminasi

Memastikan alur kerja
berjalan dengan baik

Menguji sistem, instrumen,
dan proses bisnis statistik

Finalisasi sistem



Metadata

Identifikasi
Kebutuhan

Rancangan

Implementasi
Rancangan

**Pengum-
pulan**

Pengo-
lahan

Analisis

Diseminasi

Evaluasi

Pengumpulan

Membangun kerangka
sampel dan pemilihan
sampel

Mempersiapkan
pengumpulan data melalui
pelatihan petugas

Melakukan pengumpulan
data



Metadata

Identifikasi
Kebutuhan

Rancangan

Implementasi
Rancangan

Pengum-
pulan

Pengo-
lahan

Analisis

Diseminasi

Evaluasi

Pengolahan

Integrasi data

Penyuntingan (*editing*),
penyahan (*validation*),
dan imputasi

Menghitung penimbang
(*weight*)

Melakukan estimasi dan
agregat



Metadata

Identifikasi
Kebutuhan

Rancangan

Implementasi
Rancangan

Pengum-
pulan

Pengo-
lahan

Analisis

Diseminasi

Evaluasi

Analisis

Menyiapkan naskah *output*
(tabulasi)

Penyahiian *output*
(pemeriksaan konsistensi
antartabel)

Interpretasi *output*

Penerapan *Disclosure
Control*



Metadata

Identifikasi
Kebutuhan

Rancangan

Implementasi
Rancangan

Pengum-
pulan

Pengo-
lahan

Analisis

Diseminasi

Evaluasi

Diseminasi

Sinkronisasi antara
data dengan metadata

Menghasilkan produk
diseminasi

Manajemen rilis
produk diseminasi

Mempromosikan
produk diseminasi

Manajemen *user*
support



BADAN PUSAT STATISTIK

Pelopor
Data Statistik
Terpercaya
Untuk Semua

Metadata

Identifikasi
Kebutuhan

Rancangan

Implementasi
Rancangan

Pengum-
pulan

Pengo-
lahan

Analisis

Diseminasi

Evaluasi

Evaluasi

Mengumpulkan
masukan evaluasi

Evaluasi hasil



BADAN PUSAT STATISTIK

Pelopori
Data Statistik
Terpercaya
Untuk Semua

K/L/D/I

BPS

Statistik Dasar

A

Statistik
Sektoral

B

Statistik
Sektoral

C

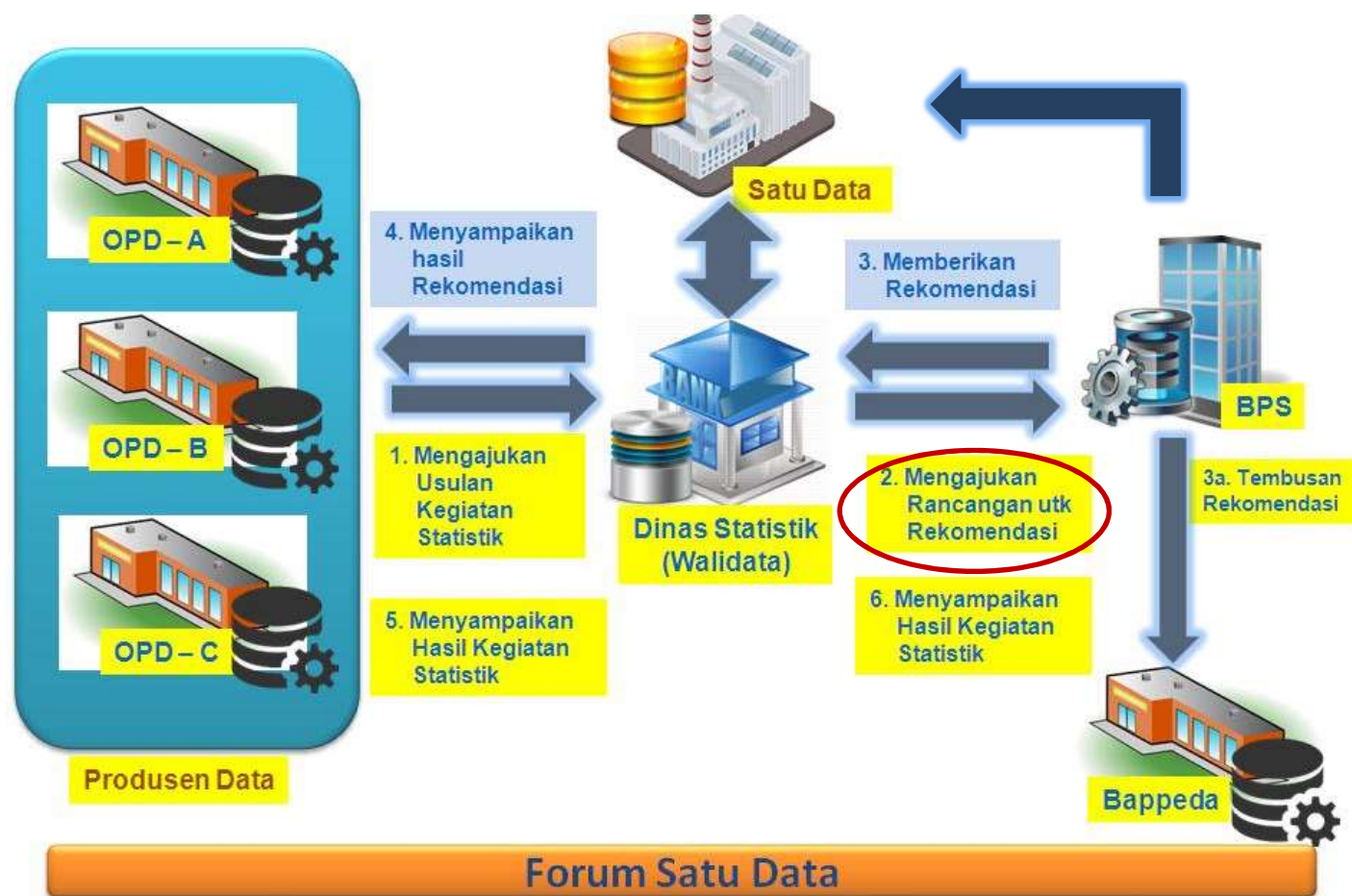
Statistik
Sektoral

**SWASTA/
INDIVIDU**

Statistik
Khusus



Mekanisme Kerja Statistik Sektor di Daerah





Tujuan *Coaching Clinic*

penguatan pemahaman tentang..

**Penyelenggaraan
kegiatan statistik**

**Pelaporan hasil
penyelenggaraan
kegiatan statistik
sektoral**

**Pengajuan
penyelenggaraan
kegiatan statistik
sektoral**



Bab III. Pelaksanaan SDI

Struktur pelaksana SDI

Pasal 4

Di tingkat Pemerintah Pusat

- Dewan Pengarah;
- Forum Satu Data Indonesia (Pembina Data dan Walidata K/L/I)
- Sekretariat Satu Data Indonesia; dan
- Produsen Data.

Di tingkat Pemerintah Daerah

- Forum Satu Data Indonesia (Pembina Data dan Walidata)
- Produsen Data.



Ilustrasi tugas: Forum Satu Data

Pasal 7

- melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- **merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Satu Data Indonesia;**
- menyusun rencana aksi tahunan Satu Data Indonesia;
- **merumuskan bahan keputusan dan/atau merumuskan bahan kebijakan umum yang akan diputuskan oleh Dewan Pengarah;**
- merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia;
- mempersiapkan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana aksi tahunan Satu Data Indonesia;
- menyepakati pembentukan kelompok kerja tematik yang diusulkan oleh Pembina Data;
- menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Satu Data Indonesia secara berkala kepada Dewan Pengarah.



Ilustrasi tugas: Pembina Data

Pasal 9

- memastikan pelaksanaan Satu Data Indonesia di seluruh K/L/D/I sebagaimana disebutkan pada Peraturan Presiden ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- bersama dengan Produsen Data dan Walidata, menentukan Standar Data dan Metadata;
- membakukan Standar Data dan format Metadata termasuk menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang dapat menjadi rujukan Produsen Data dan Walidata;
- **melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Data yang menjadi kebutuhan internal K/L/D/I dengan Walidata untuk mencegah duplikasi Data;**
- mengusulkan pembentukan kelompok kerja tematik dalam Forum Satu Data;
- **memeriksa, mengharmonisasikan, dan merekomendasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas K/L/D/I dalam Forum Satu Data Indonesia.**



Ilustrasi tugas: Walidata

Pasal 10, Ayat 3.

Walidata berperan sebagai satu-satunya unit dalam K/L/D/I yang melakukan penyebarluasan Data, serta menerima dan menindaklanjuti permintaan Data dari Pengguna Data sesuai peraturan perundang-undangan.



Ilustrasi tugas: Produsen Data

Pasal 11

- berkoordinasi dengan Walidata dan Pembina Data untuk menentukan Standar Data dan Metadata untuk Data yang akan disusun, dikumpulkan, dan diolah;
- **menyusun, mengumpulkan, dan mengolah Data sesuai dengan Standar Data, format Metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data;**
- menyampaikan Data kepada Walidata beserta **Metadata yang melekat pada Data** tersebut;
- **menyusun, mengumpulkan, dan mengolah Data sesuai dengan ketentuan Interoperabilitas Data yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;**
- memberikan masukan kepada Walidata terkait pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang perlu dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
- menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan Data K/L/D/I lain dan masyarakat.



Rekomendasi Kegiatan Survei Statistik Sektor

PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Pasal 26 Ayat 2

Penyelenggara kegiatan statistik sektoral wajib:

- memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS
- mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS
- menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS

? Mengapa perlu

- Agar tidak terjadi duplikasi kegiatan statistik sektoral
- Menyusun *database* metadata statistik sektoral
- Membantu mewujudkan Sistem Statistik Nasional

? Siapa yang wajib

K/L/I/D yang kegiatan surveinya:

dilaksanakan sendiri

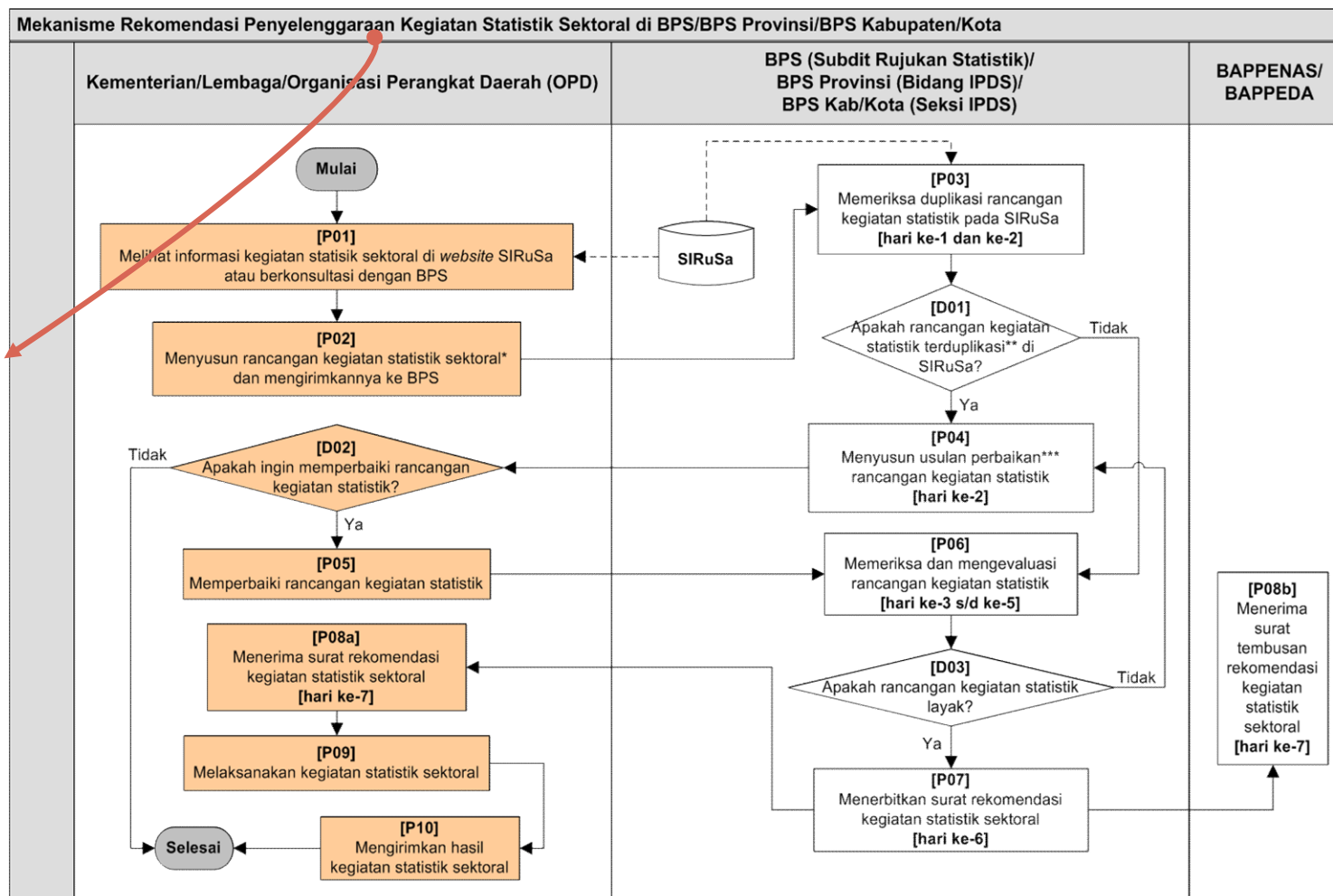
disubkontrakan kepada pihak lain (konsultan)

dipublikasi untuk umum



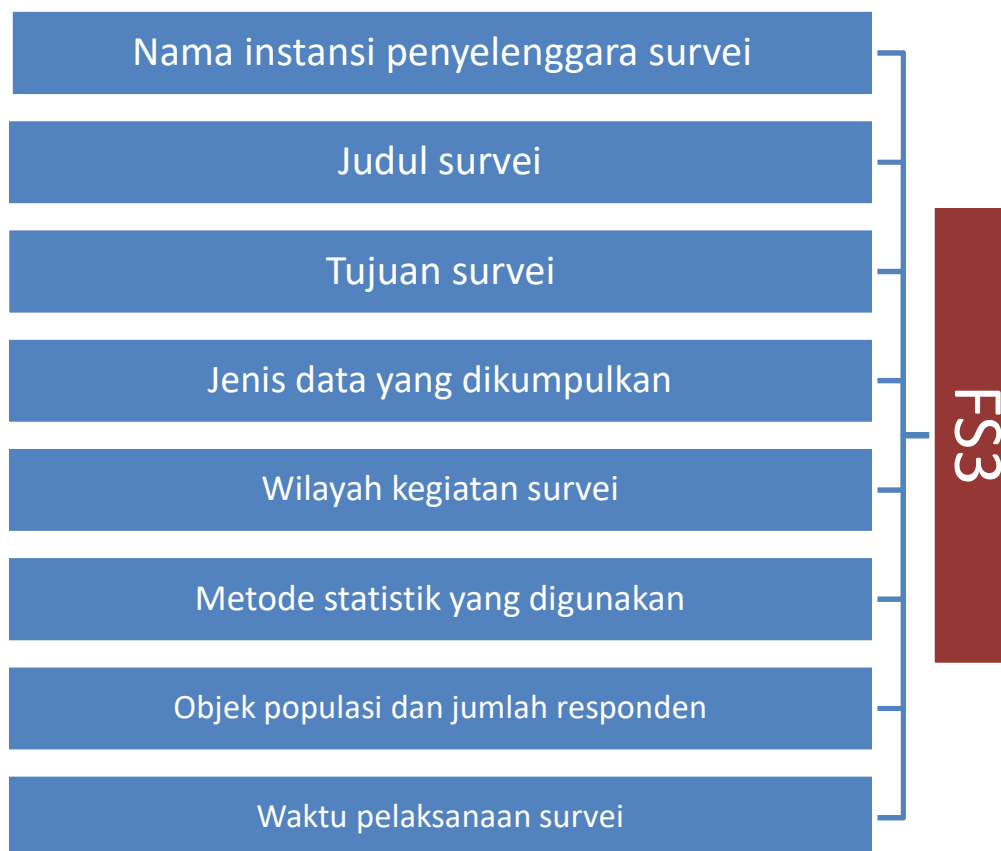
Mekanisme Rekomendasi

OPD yang memiliki
wewenang untuk
urusan statistik





Rencana penyelenggaraan survei statistik sektoral disampaikan dalam bentuk rancangan yang memuat:





BADAN PUSAT STATISTIK

Pelopor
Data Statistik
Terpercaya
Untuk Semua

FS3

3.90.2.08.16.01.00.00.000.D101

Nomor
rekomendasi
(diisi oleh BPS)



Badan Pusat Statistik

FS3

FORMULIR PEMBERITAHUAN
SURVEI STATISTIK SEKTORAL

Judul Survei :

Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2016

Identitas Rekomendasi (diisi oleh BPS)

3.90.2.08.16.01.00.00.000.D101



KOORDINASI KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

(melalui Direktorat Diseminasi Statistik, 2016 - 2017)

No	Kementerian / Kegiatan Statistik Sektoral
1	KemenPANRB / Pelayanan Publik
2	Kemenko PMK / Pelayanan Publik
3	KemenPUPR / Indikator permukiman kumuh, air bersih, dan rumah tangga layak huni
4	ESDM / Pertukaran data
5	Kemendag / Pertukaran data
6	Kemenkeu (DJPB) / Survei Kemahalan Konstruksi
7	KomnashAM / Pelayanan Publik
8	Sekretariat Presiden & Sekretariat Wakil Presiden/ Kelancaran Pelayanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden
9	ESDM / Survei Pemanfaatan Energi
10	Kementerian Agama / Pelayanan Publik
11	Kemensos / Pelayanan Publik
12	PerpusNas / MonEv Dana Dekon (provinsi) dan Fasilitasi Pelayanan Publik di desa/kel, LAPAS dan Komunitas



Siklus Kegiatan Sensus dan Survei BPS

<http://bps.go.id/>

<http://microdata.bps.go.id/>

<http://sirusa.bps.go.id/>



<http://sp2010.bps.go.id/>



<http://st2013.bps.go.id/>



<http://se2016.bps.go.id/>

SUPAS



BADAN PUSAT STATISTIK

Pelopop
Data Statistik
Terpercaya
Untuk Semua



BADAN PUSAT STATISTIK



SELAMAT! WEBSITE BPS
TERPILIH DALAM INOVASI PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL 2016

Indonesia | [English](#)

[Manual](#) | [Tautan](#) | [Peta Situs](#) | [S&K](#)

[Beranda](#)

[Tentang Kami](#)

[Berita](#)

[Senarai Rencana Terbit](#)

[Publikasi](#)

[Berita Resmi Statistik](#)

[Informasi Publik](#)

[Galeri Introgans](#)

[TABEL DINAMIS](#)

[INDIKATOR STRATEGIS](#)

[Cara Mendapatkan Data BPS](#)

[PNBP](#) • [No! Rupiah](#) • [Gratis](#)

[Unduh](#)

[Istilah Statistik](#)

[Katalog Datamikro](#)

[Metadata](#)

[Reformasi Birokrasi](#)

[STATCAP CERDAS](#)

[Master File Desa](#)

[SPK Online](#)

[Sistem Pencarian Kode Klasifikasi](#)

[PPID](#)

[Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi](#)

[Layanan Pengadaan
Secara Elektronik](#)

(Sumber: SPPLH 2013)

Grafik

Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia



UPDATE
Hasil Sensus Pertanian **st2013**

UPDATE
Hasil Sensus Penduduk 2010

SENSUS EKONOMI 2016

Moto Pelayanan Kami

Melayani
dengan Hati

RSS FEEDS



[Berita Resmi Statistik](#)



[Publikasi](#)

Untuk informasi mengenai Sensus Ekonomi 2016, silahkan menghubungi Call Center: (021) 3507048 || Website BPS meraih TOP 35 Penghargaan Pelayanan Publik Nasional tahun 2016



BADAN PUSAT STATISTIK

Pelopor
Data Statistik
Terpercaya
Untuk Semua



BADAN PUSAT STATISTIK



**SELAMAT! WEBSITE BPS
TERPILIH DALAM INOVASI PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL 2016**

Indonesia | English

Cari
Manual | Tautan | Peta Situs | S&K

Beranda

Tentang Kami ▾

Berita

Senarai Rencana Terbit ▾

Publikasi

Berita Resmi Statistik

Informasi Publik ▾

Galeri Inrograis

TABEL DINAMIS

INDIKATOR STRATEGIS

Cara Mendapatkan Data BPS
PNBP • Nol Rupiah • Gratis

Unduh

Istilah Statistik

Katalog Datamikro

Metadata

Reformasi Birokrasi

STATCAP CERDAS

Master File Desa

SPK Online
Sistem Pencarian Kode Klasifikasi

PPID
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi

Layanan Pengadaan
Secara Elektronik

(Sumber: SPPLH 2013)

Grafik

Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia



UPDATE
Hasil Sensus Pertanian **st2013**

UPDATE
Hasil Sensus Penduduk 2010

SENSUS EKONOMI 2016

Moto Pelayanan Kami

Melayani
dengan Hati

RSS FEEDS



Berita Resmi Statistik



Publikasi

Untuk informasi mengenai Sensus Ekonomi 2016, silahkan menghubungi Call Center: (021) 3507048 || Website BPS meraih TOP 35 Penghargaan Pelayanan Publik Nasional tahun 2016



BADAN PUSAT STATISTIK

Pelopori
Data Statistik
Terpercaya
Untuk Semua

Pengenalan Indikator



Indikator





Validity

Relevance

Predictive

Goal Driven

Coverage

Understandable

S
Y
A
R
A
T

I
N
D
I
K
A
T
O
R

Measurable

Reliability

***Accessibility/
Availability***

Timely

Responsive



Ukuran Indikator

Data Absolut

Ukuran yang digunakan untuk menunjukkan jumlah absolut/mutlak suatu obyek atau suatu kejadian/peristiwa yang terjadi di daerah tertentu dalam suatu periode tertentu

Contoh:

- **Jumlah angkatan kerja** merupakan jumlah umur 15 tahun ke atas yang bekerja ditambah jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang pengangguran.
- **Jumlah penerimaan dari wisatawan mancanegara** merupakan jumlah pengeluaran wisman yang mengkonsumsi barang dan jasa selama berada di Indonesia.
- **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** merupakan nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu.



Ukuran Indikator

Ukuran perbandingan satu jumlah dengan jumlah yang lainnya atau perbandingan antara dua bilangan atau dua angka (pembilang/numerator dan penyebut/ denominator) yang saling terpisah satu sama lain atau pembilang bukan bagian dari penyebut

Rasio Perbandingan

Contoh:

- **Kepadatan penduduk** merupakan rasio jumlah penduduk terhadap luas wilayah.
- **Rasio penumpang per pesawat udara** merupakan rasio total jumlah penumpang yang datang atau berangkat dengan pesawat udara (orang) terhadap total jumlah armada pesawat udara yang datang atau berangkat (unit).
- **Rasio penduduk terhadap mobil penumpang** merupakan perbandingan antara jumlah penduduk di suatu daerah dengan jumlah mobil penumpang.



Ukuran Indikator

Proporsi

Ukuran perbandingan antara dua bilangan, dimana pembilangnya merupakan bagian dari penyebut atau jumlah satu subgrup populasi dibagi dengan jumlah populasi

Contoh:

- **Proporsi murid putus sekolah 7-12 tahun** merupakan proporsi jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah (tamat dan yang tidak tamat).



Ukuran Indikator

Persentase

bentuk perbandingan yang dikalikan dengan 100 atau dinyatakan per seratus (persen)

Contoh:

- **Angka melek huruf** merupakan perbandingan jumlah penduduk yang melek huruf (15+) terhadap jumlah penduduk (15+) pada tahun ke-t yang dinyatakan dalam persentase.
- **Cakupan imunisasi** merupakan perbandingan yang dinyatakan dalam bentuk persentase untuk anak usia 1-2 tahun yang diimunisasi lengkap terhadap jumlah anak usia 1-2 tahun pada suatu wilayah dan waktu tertentu.
- **Tingkat hunian kamar** merupakan perbandingan banyaknya malam kamar yang terpakai terhadap banyaknya malam kamar yang tersedia dikalikan dengan 100 (dinyatakan dalam persentase).



Ukuran Indikator

indikator atau ukuran yang mengacu pada ukuran statistik dari perubahan yang biasanya dinyatakan dalam angka tanpa satuan

Indeks

Contoh:

- **Indeks Tunggal** : indeks harga, Angka Melek Huruf untuk mengukur kemampuan baca tulis.
- **Indeks Komposit** : Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung dari beberapa indikator: Indeks Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah), Indeks Pengeluaran, dan Indeks Kesehatan.



Ukuran Indikator

Rate/
Angka/
Tingkat

jumlah kejadian/peristiwa dalam suatu periode tertentu dibagi populasi *at risk* selama periode tersebut

Contoh:

- **CBR (Crude Birth Rate)** pada tahun 2013 di Provinsi XYZ adalah 25, artinya pada tahun 2013 ada 25 kelahiran di Provinsi XYZ tiap 1000 penduduk.
- **ASFR 20-24 (Age Specified Fertility Rate usia 20-24 tahun)** pada tahun 2013 di Provinsi XYZ adalah 0,015, artinya pada tahun 2013 ada 15 kelahiran di provinsi XYZ tiap 1000 wanita subur usia 20-24 tahun.



Kohor adalah sekelompok penduduk yang mempunyai pengalaman waktu yang sama dari suatu peristiwa tertentu.

Prevalensi mengacu pada kejadian pada tahun tertentu.

Insidensi mengacu pada frekuensi kejadian misalnya perkembangan penyakit yang baru dalam suatu populasi dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Ukuran
Indikator

Kohor/
Prevalensi/
insidensi

Contoh:

- **Kohor** : Kohor kelahiran menggambarkan penduduk di suatu daerah yang lahir pada tahun yang sama.
- **Prevalensi** : prevalensi hipertensi, merupakan jumlah penduduk 18 tahun ke atas yang mengalami hipertensi pada waktu tertentu (termasuk tahun-tahun sebelumnya) dibagi jumlah penduduk 18 tahun ke atas (dalam persen).
- **Insidensi** : Insidensi Rate penyakit TBC di Kenya pada tahun 1996 adalah 97 per 100.000 penduduk, artinya pada tahun 1996 ada 97 (kasus baru) orang menderita TBC tiap 100.000 penduduk Kenya.



METADATA



Informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya membuat **menjadikan suatu informasi mudah** untuk **ditemukan kembali**, digunakan, atau dikelola.

Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Metadata ini mengandung informasi mengenai **isi dari suatu data** yang dipakai untuk keperluan manajemen *file/data* itu nantinya dalam suatu basis data.



Data bentuk
teks

metadatanya berupa keterangan nama ruas (*field*), panjang *field*, dan tipe fieldnya: *integer*, *character*, *date*, dll.



Data bentuk
gambar

metadatanya mengandung informasi siapa pemotretnya, kapan pemotretannya, dan *setting* kamera saat pemotretan



Data bentuk
kumpulan *file*

metadatanya adalah nama-nama file, tipe file, dan nama pengelola (administrator) dari file-file tersebut



- Contoh:
 - **Metadata Folder**
 - Metadata File





- Contoh:
 - Metadata Folder
 - **Metadata File**





- Contoh:
 - Metadata Folder
 - **Metadata File**



102

Dimensions: 1656 x 1242
Date Picture Taken: 5/23/2007 9:12 AM
Camera Model: KODAK DX6440 ZOOM DIGITAL CAMERA
Type: JPEG Image
Size: 310 KB



100

Dimensions: 2304 x 1728
Date Picture Taken: 5/23/2007 9:21 AM
Camera Model: KODAK Z730 ZOOM DIGITAL CAMERA
Type: JPEG Image
Size: 843 KB



Metadata

informasi mengenai data atau data tentang data

Metadata Struktural

INDIKATOR

mencakup penjelasan mengenai:

- Konsep/definisi
- Pengukuran/
penghitungan
- Interpretasi

Metadata Deskriptif

KEGIATAN

mencakup penjelasan mengenai:

- Cara perolehan
- Penanggung jawab
- Tujuan



Metadata

informasi mengenai data atau data tentang data

Metadata Deskriptif

metadata yang menjelaskan suatu sumber untuk tujuan mencari dan mengidentifikasi suatu data

Metadata Struktural

metadata yang mengindikasikan teknis pembuatan suatu data.

Metadata Administratif

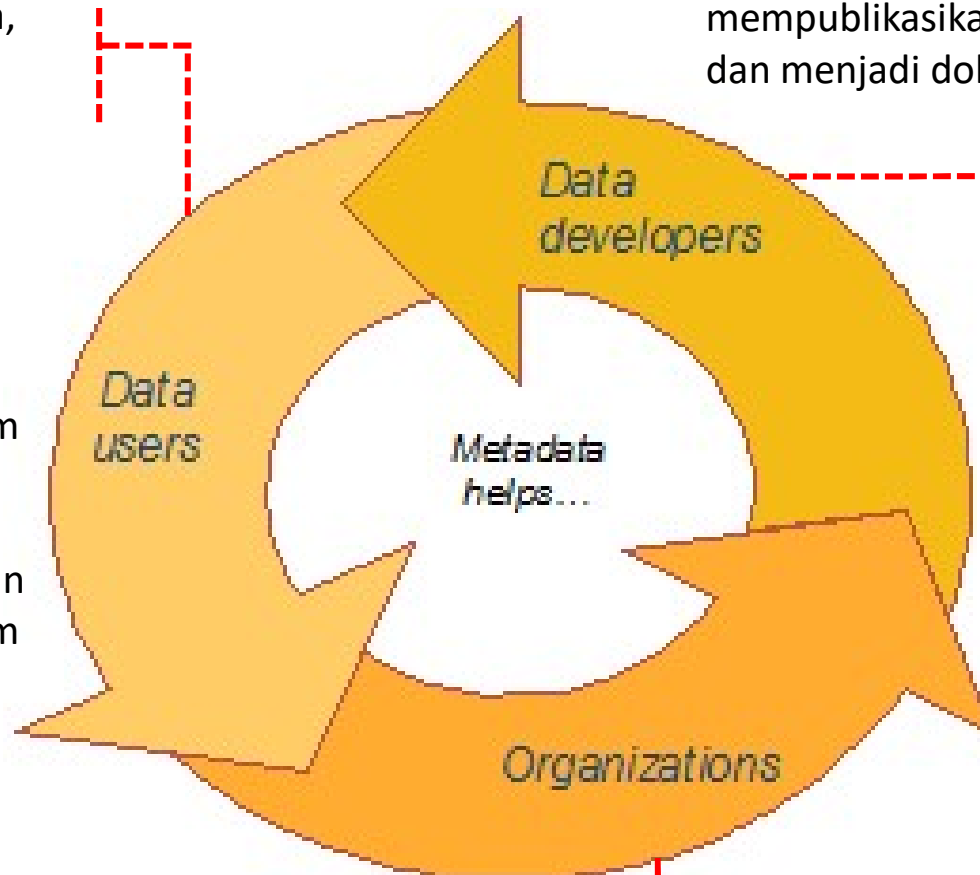
metadata yang berisi informasi untuk membantu pengelolaan suatu sumber daya



Manfaat metadata

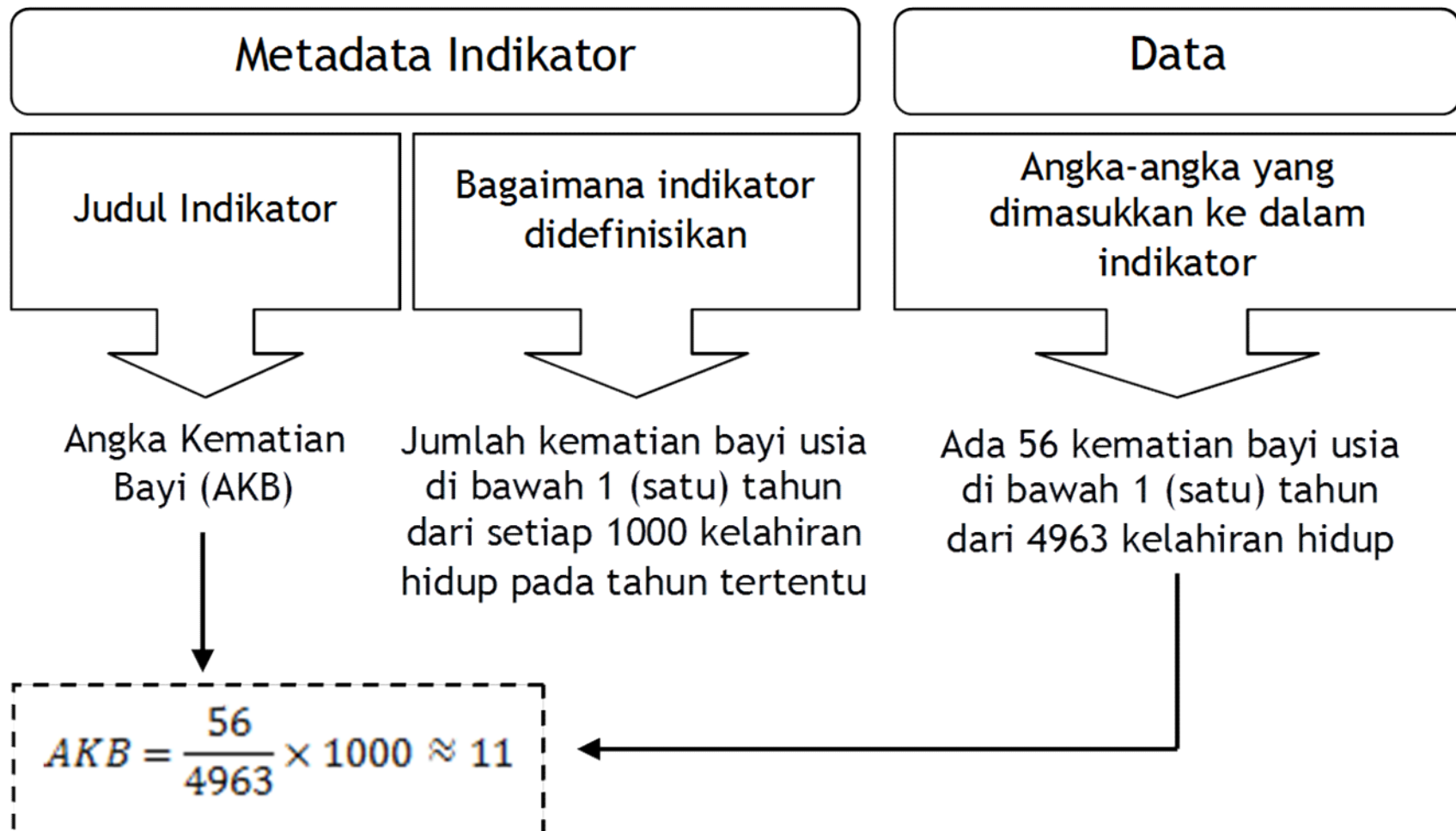
metadata dapat menghindari duplikasi, membagikan informasi yang sebenarnya, mempublikasikan usaha, mengurangi beban kerja dan menjadi dokumentasi informasi data

Bagi pengguna data, metadata dapat memudahkan pencarian maupun evaluasi informasi baik dari dalam maupun luar organisasi, memudahkan dalam menggunakan data agar sesuai dengan yang diperlukan, dan memudahkan dalam mengidentifikasi bagaimana data tersebut diperoleh, dihitung, dan diestimasi



Bagi organisasi atau institusi, metadata dapat berguna untuk memudahkan pengelolaan data sebagai investasi organisasi, Dokumentasi yang meliputi tahapan pengolahan data, pengendalian mutu, definisi, penggunaan data, keterbatasan, dan sebagainya

CONTOH METADATA INDIKATOR





Laju Pertumbuhan Penduduk

KONSEP

Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik.

Mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu

- LPP > 0 berarti terjadi penambahan penduduk.pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- LPP = 0 berarti tidak terjadi perubahan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- LPP < 100 berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{1/t} - 1$$

dengan:

r : Laju pertumbuhan penduduk

P_t : Jumlah penduduk tahun t

P_0 : Jumlah penduduk tahun awal

t : Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

Badan Pusat Statistik (BPS)

Sensus Penduduk, Supas

WALIDATA

SUMBER DATA

M
A
N
F
A
A
T
P
I
N
T
E
R
A
S
I

R
U
M
U
S



Laju Inflasi

KONSEP

Persentase perubahan Indeks Harga Konsumen. Dalam penghitungan laju inflasi dapat menggunakan inflasi per tahun dan inflasi bulan berjalan.

- Memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.
- Sebagai indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil, perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi anggaran dan parameter ekonomi makro lain.
- Menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga dan perubahan nilai dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan.

- Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 82 kota pada Februari 2017 terjadi inflasi sebesar 0,23 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 127,94 pada Januari 2017 menjadi 128,24 pada Februari 2017.

Artinya pada bulan februari 2017 terjadi kenaikan indeks harga konsumen sebesar 0,23 persen.

$$\text{Inf}_n = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}_{(n-1)}}{\text{IHK}_{(n-1)}} \times 100$$

atau

$$\text{Inf}_n = \left(\frac{\text{IHK}_n}{\text{IHK}_{(n-1)}} - 1 \right) \times 100$$

dengan:

Inf_n : inflasi tahun n

IHK_n : indeks harga konsumen thn ke n

IHK_{n-1} : indeks harga konsumen thn n-1

Badan Pusat Statistik (BPS)

Indeks/Persen

Survei Harga Konsumen

WALIDATA

UKURAN

SUMBER DATA

M
A
N
F
A
T

P
I
R
N
E
T
A
R
S
I

R
U
M
U
S



Rasio Pemukiman Layak Huni

KONSEP

Rasio pemukiman layak huni menunjuk pada perbandingan luas pemukiman layak huni dengan luas wilayah pemukiman secara keseluruhan.

Manfaat

Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman. Nilai indikator ini mencerminkan kemampuan suatu daerah menyediakan kualitas pemukiman yang layak huni.

Interpretasi

Makin tinggi nilai indikator ini, semakin mampu suatu daerah tersebut menyediakan pemukiman yang layak huni, oleh karenanya semakin mampu daerah tersebut menyelenggarakan otonomi daerah.

Rumus

Rasio Pemukiman Layak Huni

$$= \frac{\text{Luas pemukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah pemukiman}}$$

Walidata

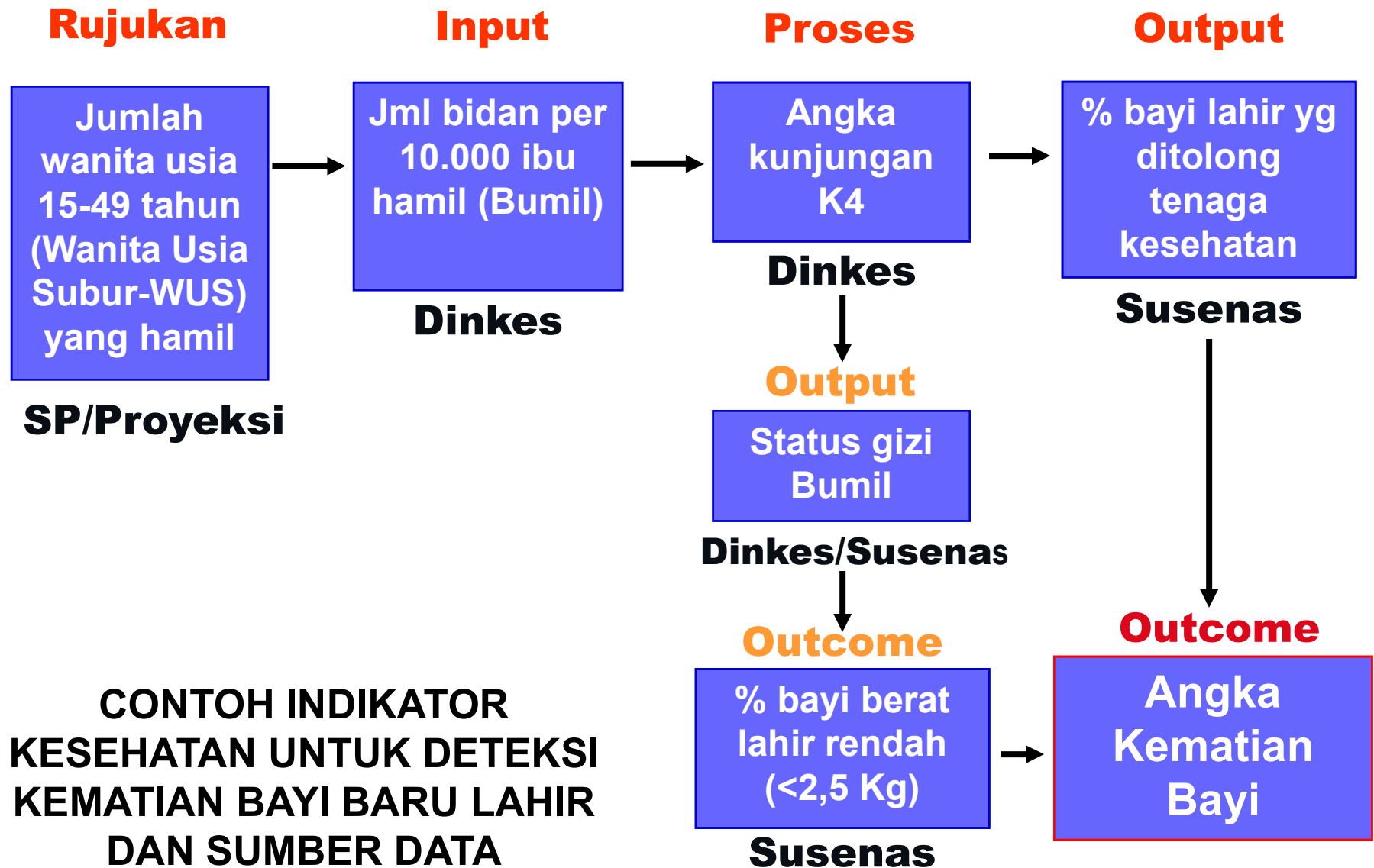
Kementrian PU

Ukuran

Indeks/Persen

Sumber Data

Kementrian PU dan DDA





Pencapaian Wajib Belajar 9 Tahun

RUJUKAN

Penduduk
usia sekolah
7-15 tahun

BPS

INPUT

Rasio murid
thd: guru,
kelas, sekolah

Diknas

PROSES

Angka
Penyerapan
SD, SLTP

Diknas

APS
APK
APM

Susenas

OUTCOME

RATA-2 LAMA SEKOLAH
ANGKA PUTUS
SEKOLAH
ANGKA MELEK HURUF

Susenas

OUTPUT

ANGKA LULUSAN
ANGKA MELANJUTKAN

Diknas



Contoh Kasus di Lapangan

Maternal Mortality Rate

- Per 100.000 kelahiran hidup (beda penghitungan)

Kode Wilayah

- Referensi BPS dan Kemendagri

Penduduk

- De facto dan De Jure

APS/APM/APK

- Pendekatan Sekolah dan Rumah Tangga

Kesakitan/Kesehatan

- Data RS dan Rumah Tangga (Lintas Wilayah)



Contoh Kasus di Lapangan

KONSEP BPS		KONSEP DINAS
Penghitungan MMR dilakukan per 100.000 kematian, jadi MMR hanya dapat dihitung sampai dengan level provinsi	M M R	MMR dihitung sampai dengan level kecamatan dengan menggunakan penghitungan per 1000 kematian
Penduduk dihitung berdasarkan tempat dimana mereka tinggal sekurang-kurangnya 6 bulan pada saat sensus dilakukan (<i>de facto</i>)	P U D U K	Penduduk dihitung berdasarkan tempat dimana mereka tercatat berdasarkan KTP /identitas hukum yang sah (<i>de jure</i>)
Penghitungan berdasarkan jumlah anggota rumah tangga umur sekolah pada wilayah tersebut	A P K	Penghitungan berdasarkan data registrasi siswa yang dilaporkan ke Dinas Pendidikan oleh setiap sekolah
Penghitungan berdasarkan jumlah anggota rumah tangga yang mengalami keluhan kesehatan	K H E S E A N	Penghitungan berdasarkan jumlah pasien menurut jenis penyakit yang di data oleh Rumah Sakit setempat dan dilaporkan ke dinas kesehatan



BADAN PUSAT STATISTIK

Pelopori
Data Statistik
Terpercaya
Untuk Semua

TERIMA KASIH

